

Peran AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) Dalam Menangani Pemulihan Ekonomi di Indonesia Pasca COVID 19

Mia Safira Hakim¹, Sirwan Yazid Bustami, S.IP., MA², Hasbi Asyidiqi, S.Sos., MSi³

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

safiramaia@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to explain the role of the AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) in handling economic recovery in Indonesia after the COVID 19 pandemic. The formulation of the problem in this study is "What is the role of the AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) in handling economic recovery in Indonesia after the COVID 19 pandemic." To answer the problem formulation in this study, the author uses the theory of liberal international organizations and the concept of International Financial Institutions. The research methodology used is descriptive qualitative research method, where data is obtained through literature study. The results of this research are explained in several parts, namely, 1) CARES Program Loan Agreement, 2) COVID 19 Emergency Response Program Loan Agreement, 3) Joint Financing of CARES Program and COVID 19 Emergency Response Program, 4) Technical Assistance, 5) Supervision, and 6) Policy Advice. The findings of this study are that in dealing with the economy in Indonesia AIIB provides loans in stages for Indonesia under the Crisis Recovery Facility (CRF) program, CRF is a program established by AIIB to facilitate its members in dealing with the impacts caused by COVID 19. In this lending scheme AIIB collaborates with the World Bank and the Asian Development Bank (ADB) for joint financing in the CARES program and the COVID 19 emergency response program, as well as providing technical, supervision and policy advice. These programs are an important factor in helping Indonesia recover from the economic impact of the COVID 19 pandemic by improving the healthcare system and providing financial support to vulnerable households to help boost consumption.

Keywords: AIIB, Indonesian Economy, COVID 19, Crisis Recovery Facility (CRF)

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) dalam menangani pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemic COVID 19. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa peran AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) dalam menangani pemulihan ekonomi di Indonesia pasca pandemic COVID 19." Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori organisasi internasional liberal dan konsep *International Financial Institutions*. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini dijelaskan dalam beberapa bagian yaitu, 1) Perjanjian Pinjaman Program CARES, 2) Perjanjian Pinjaman Program Tanggap Darurat COVID 19, 3) Pembiayaan Bersama Program CARES dan Program Tanggap Darurat COVID 19, 4) Bantuan Teknis, 5) Pengawasan, dan 6) Saran Kebijakan. Temuan penelitian ini adalah dalam menangani ekonomi di Indonesia AIIB memberikan pinjaman secara bertahap untuk Indonesia di bawah program *Crisis Recovery Facility (CRF)*, *CRF* merupakan program yang dibentuk oleh AIIB untuk memfasilitasi anggotanya dalam menghadapi dampak yang diakibatkan oleh COVID 19. Dalam skema peminjaman ini AIIB berkolaborasi

dengan Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk pembiayaan bersama dalam program CARES dan program tanggap darurat COVID 19, selain itu juga memberikan teknis, pengawasan dan saran kebijakan. Program-program ini merupakan faktor penting membantu Indonesia pulih dari dampak ekonomi pandemi COVID 19. Dengan memperbaiki sistem layanan kesehatan dan memberikann dukungan finansial kepada rumah tangga yang rentan untuk membantu meningkatkan konsumsi masyarakat.

Kata Kunci: AIIB, Perekonomian Indonesia, COVID 19, *Crisis Recovery Facility (CRF)*.

PENDAHULUAN

COVID 19 merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali terdeteksi pada bulan Desember tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sejak kasus pertama diidentifikasi di Wuhan, virus ini telah menyebar ke banyak negara di seluruh dunia. Pertanggalan pasti penyebaran ke semua negara sulit dipastikan karena setiap negara melaporkan kasus secara berbeda. Namun, World Health Organization (WHO) mengumumkan status pandemi global COVID 19 pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Pada saat itu jumlah kasus dan kematian terus meningkat secara signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Pasca penetapan COVID 19 sebagai pandemi, banyak negara melakukan disease containment melalui pembatasan perjalanan, dan kontak fisik, bahkan Lockdown.

Kebijakan pembatasan menekan penyebaran virus, namun memicu pelemahan ekonomi dunia yang tajam. Australia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Tiongkok, dan Vietnam merupakan beberapa negara yang cukup sukses menekan penyebaran virus melalui kebijakan pembatasan aktivitas. Namun, kebijakan tersebut menyebabkan disrupsi pada rantai pasokan, menurunkan aktivitas produksi dan konsumsi masyarakat, meningkatkan pengangguran, dan mengoreksi pertumbuhan ekonomi. Banyak negara mengalami penurunan aktivitas perekonomian yang signifikan. Beberapa negara yang paling terdampak adalah Tiongkok, Indonesia, Australia, Iran, Italia, Jepang, Hongkong, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian global, dan dampak krisis ini dapat dirasakan secara global.

Menurut laporan dari International Monetary Fund (IMF) pandemi ini telah menyebabkan resesi global dengan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di setiap negara. IMF juga memproyeksikan penurunan ekonomi global sebesar 2,7% pada tahun 2023. Sementara itu, di Indonesia, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) akan menurun menjadi 4,7% pada tahun 2023. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati juga memperkirakan bahwa perekonomian global akan semakin melemah pada tahun 2023.

Dalam menghadapi situasi ini, untuk mengatasi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, negara-negara berkembang seperti Indonesia memerlukan stimulus ekonomi yang besar dan beragam, termasuk dukungan sektor keuangan, sosial, dan infrastruktur, untuk memulihkan pertumbuhan perekonomian dengan mengambil tindakan kerja sama ekonomi internasional dengan lembaga-lembaga keuangan seperti AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank). Kerja sama ekonomi internasional ini dapat menjadi salah satu langkah yang penting dalam menghadapi permasalahan perekonomian pasca pandemi COVID 19. Sebagai salah satu pendiri, Indonesia memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan di AIIB. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa kepentingan Indonesia diperhitungkan dalam alokasi dan pendanaan proyek. Keanggotaan Indonesia dalam AIIB ini dapat digunakan dalam konteks pemulihan pasca pandemi untuk mencari dukungan keuangan dan teknis. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur di tingkat regional, sambil mendapatkan manfaat dari sumber dana dan kerja sama yang ditawarkan. AIIB memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan

dengan lembaga-lembaga internasional lainnya. Ini dapat membantu Indonesia dalam mendapatkan sumber dana yang lebih terjangkau untuk proyek-proyeknya.

AIIB merupakan bank pembangunan multilateral yang sebagian besar anggotanya adalah negara-negara berkembang di Asia, yang memiliki tujuan untuk memberikann bantuan keuangan dan fokus pada investasi infrastruktur di kawasan Asia. Meskipun AIIB fokus pada infrastruktur, AIIB juga dapat berkontribusi dalam stimulus ekonomi yang lebih luas melalui proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu juga AIIB dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan internasional dan nasional lainnya untuk memberikan dukungan lintas sektor yang mencakup infrastruktur, sektor sosial, ekonomi dan kesehatan.

AIIB memiliki peran penting dalam membantu anggotanya, termasuk Indonesia, dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inovatif. Berikut adalah beberapa peran AIIB dalam memberikan pinjaman anggotanya: 1) Menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur: AIIB memberikann pinjaman, jaminan, dan investasi ekuitas untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur di negara-negara anggotanya. Dengan mendanai proyek-proyek infrastruktur, AIIB membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara-negara anggotanya, 2) Mempromosikan pembangunan berkelanjutan: AIIB berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dengan mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan sosial. Hal ini mencakup proyek-proyek yang mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan, 3) Memperkuat kerja sama regional: AIIB mempromosikan kerja sama regional dengan menyatukan negara-negara di Asia untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi kawasan ini secara keseluruhan. Dengan bekerja sama, negara-negara anggota dapat berbagi pengetahuan dan sumber daya, serta menciptakan kawasan yang lebih terintegrasi dan terhubung, 4) Menyediakan bantuan teknis dan berbagi pengetahuan: AIIB memberikann bantuan teknis dan berbagi pengetahuan untuk membantu negara-negara anggotanya mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Hal ini termasuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta berbagi praktik terbaik dan pelajaran yang dapat dipetik dari proyek-proyek lain.

Secara keseluruhan, AIIB memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Dengan menyediakan pendanaan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, memperkuat kerja sama regional, serta memberikann bantuan teknis dan berbagi pengetahuan. Tulisan ini akan membahas peran AIIB dalam menangani pemulihan ekonomi di Indonesia pasca COVID 19.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama, berjudul *The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in The Middle East*. Penelitian ini membahas bahwa Dewan Gubernur AIIB mengadakan pertemuan tahunan ke-6 di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 27-28 Oktober 2021 untuk mendekatkan AIIB dengan para anggotanya, mitra, pengusaha, organisasi masyarakat, dan bahkan para peneliti. Pertemuan ini diikuti oleh kontribusi AIIB yang sudah ada di Timur Tengah melalui pendanaan

proyek tenaga surya terbesar di Oman. Proyek ini diusulkan oleh ACWA Power Gulf Investment Corporation and Alternative Energi Project Co dengan dana yang dikeluarkan sekitar USD 400 juta.

Selain itu juga ada beberapa proyek-proyek AIIB di Timur Tengah, pertama pada tahun 2017 Oman mengajukan permohonan dana untuk sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menghabiskan dana sejumlah USD 152,1 juta. Kedua, pada tahun 2021, pemerintah Yordania mengusulkan proyek yang disebut program Investasi Transfaran dan Responsif Iklim Inklusif untuk hasil dengan menghabiskan dana sejumlah USD 250 juta. Ketiga, pada tahun 2016, AIIB member Oman kredit sejumlah USD 36 juta untuk proyek kereta api di bawah bimbingan Oman Rail Direction. Ini merupakan salah satu terobosan baru bagi Oman untuk mengembangkan infrastrukturnya menjadi pusat pengekspor mineral di Timur Tengah, khususnya Teluk. Keempat, proyek pembangunan pelabuhan Duqm dengan mengeluarkan dana USD 265 juta. Proyek ini bertujuan untuk mendukung proses transformasi Oman menjadi hub transportasi di kawasan tersebut.

Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah di mana penelitian di atas membahas peran AIIB terhadap beberapa negara di Timur Tengah, berbeda dengan penelitian ini yang membahas peran AIIB terhadap pemulihan perekonomian di Indonesia pasca Pandemi COVID 19. Penelitian di atas tidak menggunakan teori atau konsep seperti penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional liberal dan konsep *International Financial Institutions*. Meskipun terdapat perbedaan, penelitian di atas memperkuat hipotesa peneliti, karena memberikann informasi bahwa pertemuan yang diadakan oleh AIIB tersebut mencerminkan bahwa upaya AIIB untuk berperan sebagai lembaga keuangan pembangunan regional dan global yang aktif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia dan di luar wilayah Asia. Selain itu juga proyek-proyek yang di paparkan mencerminkan peran AIIB dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah. Secara umum dalam tulisan yang di buat oleh Zulfikar Rakhmat, M.Habib Pashya, dan Gufron Gozali memberikan informasi terkait peranan AIIB dalam mendukung perekonomian dan konektivitas.

Penelitian kedua, berjudul Implementasi Kerja sama Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) Periode 2016-2018. Penelitian di atas membahas bahwa terdapat lima bentuk kerja sama AIIB dengan Indonesia sejak tahun 2016-2018, yakni *pertama*, proyek nasional perbaikan wilayah kumuh pada tahun 2016 dengan bantuan dana sejumlah USD 216,50 juta, *kedua*, proyek peningkatan operasional dan keamanan bendungan tahap II yang menjadi lanjutan dari peningkatan operasional dan keamanan bendungan tahap I di tahun 2015 dengan bantuan dana sejumlah USD 125 juta, *ketiga*, proyek dana pembangunan infrastruktur nasional pada tahun 2017 dengan bantuan dana sejumlah USD 100 juta, *keempat*, moderensasi irigasi strategis dan proyek rehabilitas mendesak dengan bantuan dana sejumlah USD 250 juta, *kelima*, proyek infrastruktur perkotaan dan pariwisata mandalika pada tahun 2018 dengan bantuan dana sejumlah USD 248,9 juta.

Perbedaan dari kedua penelitian ini, penelitian di atas menggunakan konsep kerja sama internasional dan kepentingan nasional untuk menjelaskan kerja sama antara AIIB dengan Indonesia periode 2016-2018 dan menjelaskan kepentingan antara Indonesia dan AIIB dalam

menjalani kerja sama, berbeda dengan penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional liberal dan konsep *international financial institutions* untuk menjelaskan kerja sama antara Indonesia dengan AIIB dan peranan AIIB dalam menanganai perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID 19. Tulisan di atas memberikann informasi penting mengenai beberapa kerja sama yang sudah terjalin antara Indonesia dan AIIB yang sudah terlaksana dari tahun 2016-2018 (sebelum terjadi pandemi COVID 19). Hal ini mencerminkan upaya AIIB untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang beragam dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kerja sama ini menunjukkan pentingnya sumber pendanaan eksternal dalam memajukan pembangunan nasional.

Penelitian ketiga, berjudul *Impact of Infrastructure Investment Bank on Development and Developing Economies*. Penelitian di atas membahas bahwa PDB per kapita di atas USD 25.000 selama 10 tahun merupakan salah satu indicator yang digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai maju. Negara-negara dengan PDB per kapita di bawah ambang ini termasuk dalam kategori ekonomi berkembang. Tulisan ini juga memaparkan bahwa negara maju umumnya berinvestasi sekitar 4,7-6,5 % dari PDB mereka dalam infrastruktur dalam periode 10 tahun. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk memelihara dan meningkatkan basis infrastruktur yang sudah kuat. Sedangkan negara-negara berkembang dalam 10 tahun terakhir, cenderung berinvestasi sekitar 7-9 % dari PDB mereka dalam infrastruktur. Hal ini mencerminkan dorongan mereka untuk mengembangkan dan modernisasi infrastruktur guna mendukung pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat. Terlihat bahwa negara berkembang cenderung mengalokasikan persentase PDB yang lebih tinggi untuuk investasi infrastruktur daripada negara maju. Hal ini mungkin karena negara berkembang perlu mengejar pembangunan infrastruktur yang lebih besar dan lebih mendasar. Negara berkembang memiliki tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi sebelum krisis keuangan di akhir tahun 2000-an, mencapai rata-rata 10% dari PDB. Ini menunjukkan upaya mereka dalam memperbaiki infrastruktur dasar sebagai bagian dari pembangunan ekonomi.

Selain itu, penelitian di atas juga membahas bahwa tingkat investasi infrastruktur bervariasi di seluruh kawasan. Ekonomi maju di Asia Timur memiliki tingkat investasi tertinggi, sementara ekonomi maju di Eropa dan Asia Tengah memiliki tingkat investasi terendah. Data GFCF-GG menunjukkan bahwa, secara umum, ekonomi maju investasi infrastruktur llebih sedikit daripada ekonomi berpenghasilan rendah di wilayah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasi infrastruktur tidak selalu berkorelasi secara langsung dengan tingkat pendapatan. Dalam beberapa wilayah, terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara, perbedaan dalam tingkat investasi antara ekonomi maju dan berpenghasilan rendah sangat besar. Ekonomi maju di wilayah ini berinvestasi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ekonomi berpenghasilan rendah di wilayah yang sama. Wilayah Asia Timur dan Pasifik mencatat tingkat investasi infrastruktur yang tinggi secara relative di semua kelompok pendapatan. Ini menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur yang kuat di wilayah tersebut.

Perbedaan dari kedua penelitian ini, penelitian di atas membahas bagaimana negara maju dan negara berkembang dalam melakukan investasi infrastruktur dan memaparkan dengan data longitudinal, pertama, dengan cakupan yang lebih terbatas dari organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi (OECD), kedua, menggunakan pembentukan modal tetap bruto

pemerintah secara umum. Berbeda dengan penelitian ini fokus pada peran AIIB dalam menangani pemulihan perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID 19.

Walapun ada perbedaan dalam penelitian di atas memberikan informasi bahwa perbedaan dalam pendekatan investasi infrastruktur antara negara maju dan berkembang, yang mencerminkan kebutuhan dan sumber daya yang berbeda di kedua kelompok negara ini. Investasi infrastruktur yang memadai penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terlepas dari status ekonomi. Selain itu juga tulisan ini memberikan informasi pentingnya investasi infrastruktur dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana tingkat investasi dapat bervariasi berdasarkan lokasi geografis dan tingkat pendapatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi maju tidak selalu menginvestasikan lebih banyak dalam infrastruktur daripada ekonomi berpenghasilan rendah, dan faktor-faktor lain seperti kebijakan, prioritas, dan kondisi local memainkan peran penting dalam menentukan tingkat investasi infrastruktur.

Penelitian keempat, berjudul *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)'s Sustainable Safeguard Mechanism on Energi Projects*. Penelitian ini membahas bahwa dalam menyediakan mekanisme perlindungan dan sosial yang komprehensif, jelas, dan dapat diandalkan untuk proyek-proyek energi, AIIB masih jauh dari harapan. Dalam hal kebijakan perlindungan terhadap proyek-proyek energi, ditemukan bahwa tidak ada pedoman lingkungan dan sosial yang kuat dengan komitmen yang jelas untuk mengecualikan pembangkit listrik dan proyek-proyek yang terkait dengan batu bara, serta pengetatan bahan bakar fosil. Dengan membandingkan mekanisme safeguard proyek energi yang dibiayai bersama dan proyek energi yang berdiri sendiri, terlihat bahwa proyek energi yang berdiri sendiri masih mengacu pada safeguard dari MDB dan lembaga keuangan lainnya untuk mempersiapkan ESIA, ESMP dan dokumen safeguard berkelanjutan lainnya. Alasan utamanya adalah ESF dan strategi sektor energi AIIB tidak dapat memberikan persyaratan dan pedoman yang memadai untuk proyek-proyek tersebut.

Perbedaan dari kedua penelitian ini, penelitian di atas fokus penelitian melihat bagaimana mekanisme dan kebijakan safeguard AIIB terhadap proyek-proyek energi. AIIB telah menetapkan kebijakan perlindungan dan kerangka kerja lingkungan sosial (ESF) sebagai strategi sektor energi AIIB dan diterapkan untuk proyek-proyek yang didanai. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus melihat peranan AIIB dalam menangani perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID 19. Meskipun memiliki perbedaan, tulisan ini memberikan informasi pentingnya mekanisme perlindungan dan sosial yang kuat dalam proyek-proyek energi agar dampak lingkungan dan sosial dapat diminimalkan dan sesuai dengan standar internasional. Kritik yang diberikan untuk AIIB ini dapat mendorong AIIB untuk meningkatkan dan memperjelas pedoman dan persyaratan terkait proyek-proyek energy, serta untuk lebih menegaskan komitmennya terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi ke energy bersih.

Penelitian kelima, berjudul *Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB): Wujud Dominasi Tiongkok di Dunia*. Penelitian ini membahas bahwa dengan pendirian AIIB, Tiongkok mencoba untuk mengatasi dominasi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa. Ini merupakan upaya untuk menciptakan alternatif yang dapat memberikan pengakuan internasional dan mendukung proyek-proyek pembangunan yang lebih menguntungkan bagi negara-negara di Asia dan di luar Asia.

AIIB memberikan Tiongkok posisi sentral sebagai negara pendiri dan aktor utama. Dengan dukungan ekonomi yang kuat, Tiongkok dapat memainkan peran utama dalam mendukung rencana seperti One Belt, One Road (OBOR) yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur regional. AIIB berhasil menarik berbagai negara untuk menjadi anggotanya, menunjukkan bahwa banyak negara melihat potensi manfaat dari kolaborasi ini dalam hal kemudahan pembangunan infrastruktur. Ini juga mencerminkan bahwa dorongan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. AIIB dapat memberikan dukungan dan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara anggotanya. Hal ini sejalan dengan visi AIIB untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut .

Melalui AIIB dan OBOR, Tiongkok berusaha untuk memperoleh dan memperkuat keunggulan kompetitif nasionalnya di bidang ekonomi dengan menggunakan arena geografis seperti hal yang baik disebut geoekonomi. Keberadaan OBOR mendukung AIIB untuk menggunakan faktor geopolitik menjadi geoekonomi. Kemampuan Tiongkok untuk membentuk dan memperkuat posisinya dapat menunjukkan bagaimana negara ini mempengaruhi dunia internasional dengan memaksimalkan lokasi dan kapasitas ekonomi nasionalnya.

Perbedaan dari kedua penelitian ini, Perbedaan pertama, penelitian di atas membahas bagaimana keberadaan AIIB yang mendukung kerja sama ekonomi menemukan bahwa AIIB dan OBOR merupakan upaya kuat Tiongkok untuk mendapatkan dominasi ekonomi. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus melihat peranan AIIB dalam menangani pemulihan perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID 19. Kedua, adalah penelitian di atas menggunakan teori teori Geoekonomi dan kepentingan nasional untuk mendeskripsikan bahwa AIIB memiliki kelebihan yaitu kerja sama global yang memberikann dana yang besar bagi anggotnya dengan mengadakan perjanjian internasional dengan Tiongkok sebesar USD 150 miliar per tahun yang dapat dipinjamkan oleh negara-negara anggota untuk membangun infrastruktur. Sedangkan peneliti menggunakan teori organisasi internasional liberal dan konsep international financial institutions untuk menjelaskan bagaimana kerja sama dan peranan AIIB dalam pemulihan perekonomian di Indonesia pasca pandemi COVID 19.

Dalam tulisan di atas memberikan informasi bagaimana AIIB berperan dalam dinamika global dan regional, serta upaya Tiongkok untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Asia dan di luar Asia. Selain itu juga dengan strategi ini, Tiongkok memaksimalkan potensinya dan memanfaatkan lokasi geografisnya untuk memperkuat keunggulan kompetitif nasionalnya. Ini mencerminkan evolusi Tiongkok sebagai pemain utama dalam ekonomi global dan dalam proses pembentukan tatanan dunia yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam yang menghasilkan data deskriptif (Meleong, 2007). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, karya ilmiah, laporan, surat kabar dan web resmi lembaga.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini data studi pustaka. Teknik studi pustaka bertujuan untuk memahami dan mengutip teori dan konsep yang berasal dari jurnal, baik jurnal domestik maupun internasional, wawancara nasional maupun internasional yang terpublikasi di internet yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti (Abdhal, 2021). Penelitian ini menggunakan model analisis data berbasis interaktif model dari Miles dan Huberman, dimana dalam model ini terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis data kualitatif, yaitu data collection, data reduction, data display dan conclusion (Singarimbun, 1989).

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI ORGANISASI INTERNASIONAL LIBERAL

Teori organisasi internasional liberal merupakan kerangka pemikiran yang mengemukakan bahwa organisasi internasional memiliki peran penting dalam mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan keselamatan global. Pendekatan liberal dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, dan ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan antara negara-negara.

Liberal juga menekankan pentingnya diplomasi multilateral dalam menangani isu-isu global yang kompleks, seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, dan perlucutan senjata nuklir. Organisasi internasional sebagai wadah diplomasi ini membantu negara-negara dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara-negara. Selain itu, liberalism mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai dasar hubungan internasional yang stabil dan berkeadilan. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memperkuat dan melindungi nilai-nilai ini melalui pengawasan, pemantauan, dan adopsi standar internasional.

Pada permasalahan ini, AIIB sebagai sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara anggota berfungsi sebagai sumber dana dan dukungan finansial untuk membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Sebagai bank pembangunan regional, AIIB memiliki peran dalam memberikann pinjaman dan investasi dalam sektor infrastruktur di Indonesia.

Prinsip liberal dalam teori organisasi internasional, seperti asas non-diskriminasi, asas perlakuan nasional, dan perdagangan bebas dapat menggambarkan bagaimana AIIB berupaya memberikann bantuan yang adil dan bermanfaat bagi Indonesia pasca COVID 19. Selain itu, kolaborasi AIIB dengan pihak lain seperti World Bank dan organisasi internasional lainnya juga mendukung prinsip liberal dalam menciptakan kerja sama dan koordinasi yang efektif untuk memulihkan perekonomian Indonesia.

KONSEP INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

International financial institutions (IFI) adalah lembaga global yang dibentuk oleh beberapa negara dengan tujuan untuk memberikann bantuan keuangan, teknis, dan pengawasan dalam rangka mempromosikan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan stabilitas keuangan di negara-negara anggota. IFI digambarkan sebagai agen reformasi ekonomi yang paling kuat di dunia, yang menyediakan pembiayaan kepada pemerintah suatu negara dimana pada umumnya adalah pemerintah negara berkembang. IFI diberikan akses ke sumber daya negara-negara peminjam tersebut tergantung pada luas reformasi kebijakan dalam negeri

mereka, termasuk pembukaan akses perdagangan dan keuangan internasional, privatisasi sumber daya alam, pengelolaan perusahaan milik negara, deregulasi kegiatan ekonomi, mereformasi regulasi layanan sosial, dan berbagai reformasi kelembagaan.

Di hampir semua negara di dunia, IFI berperan dalam pengembangan berbagai program sosial ekonomi, baik di negara berkembang maupun negara yang sedang dalam masa transisi dari negara miskin menuju negara berkembang maupun dari negara berkembang menuju negara maju. Peran IFI tersebut termasuk memberikann pertimbangan terhadap berbagai proyek pembangunan, pendanaanya, dan membantu dalam pelaksanaannya. IFI menjalankan peran ini melalui pemberian dana pinjaman, kredit dan hibah kepada pemerintah suatu negara peminjam.

Pendanaan ini biasanya terkait dengan berbagai proyek spesifik yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan berkelanjutan secara sosial. IFI juga memberikann bantuan teknis dan bantuan konsultasi kepada pemerintah negara peminjam dan melakukan penelitian ekstensif tentang isu-isu pembangunan di negara tersebut.

Tujuan IFI meliputi: 1) Mengurangi kemiskinan global dan meningkatkan standar kehidupan warga negara di negara peminjam, 2) Memberikann dukungan berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan pengembangan kelembagaan di negara peminjam,3) Mempromosikan kerja sama regional dan integrasi kepada negara peminjam.

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai belahan dunia baru-baru ini khususnya sebagai dampak krisis moneter maupun COVID 19 berdampak akhirnya pada krisis kepercayaan yang telah menyebar ke seluruh sistem sosial ekonomi internasional. Dunia harus mengalami era baru antara negara dan pasar internasional terutama guna menghindari kerugian finansial yang signifikan di seluruh dunia. Pasar keuangan internasional pada akhirnya akan pulih dari krisis yang baru-baru ini terjadi namun hasil dari proses pemulihan sosial ekonomi ini harus diikuti oleh serangkaian kebijakan dari setiap lembaga keuangan internasional yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESMENT BANK

AiIB merupakan bank pembangunan multilateral yang berkantor pusat di Beijing, Tiongkok. Didirikan pada tahun 2016 dengan misi mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan di Asia dan sekitarnya. AiIB diusulkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 dan secara resmi didirikan pada tahun 2016 dengan 57 anggota pendiri. Pada saat ini anggota AiIB memiliki 109 anggota yang telah disetujui di seluruh dunia. AiIB memiliki modal sebesar USD 100 miliar dan mendapat peringkat Triple-A dari lembaga-lembaga pemeringkat kredit internasional. Triple-A (AAA) merupakan peringkat tertinggi dalam peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga peringkat kredit kepada suatu entitas, seperti negara, perusahaan, atau instrument keuangan. Peringkat Triple A ini menunjukkan tingkat kredit yang sangat tinggi dan mengindikasikan bahwa AiIB dianggap memiliki risiko kredit yang sangat rendah. Bank ini dipimpin oleh Dewan Gubernur, Dewan Direktur, dan Presiden.

Investasi AiIB berfokus pada infrastruktur, energi, transportasi, pembangunan pedesaan, dan pembangunan perkotaan. Bank ini berkolaborasi dengan para mitra untuk membuka modal baru dan berinvestasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, dan

mendorong konektivitas regional. AIIB telah aktif dalam merespons pandemi COVID 19, dengan memberikann pinjaman kepada para anggotanya. AIIB berkomitmen terhadap keberlanjutan dan telah menetapkan standar lingkungan dan sosial untuk investasinya.

Singkatnya, AIIB adalah bank pembangunan multilateral yang mendanai proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan di Asia dan sekitarnya. AIIB berkolaborasi dengan para mitra untuk membuka modal baru dan berinvestasi pada infrastruktur yang ramah lingkungan, berbasis teknologi, dan mendorong konektivitas regional. AIIB berkomitmen terhadap keberlanjutan dan telah menetapkan standar lingkungan dan sosial untuk investasinya.

SEJARAH ASIAN INFRASTRUCTUE INVESMENT BANK

Proposal pembentukan bank ini pertama kali diajukan oleh Wakil Ketua China Center for International Economic Exchanges, sebuah lembaga pemikir dari Tiongkok, pada Bo'ao Forum di bulan April 2009. Konteks awalnya adalah untuk memanfaatkan cadangan mata uang asing Tiongkok dengan lebih baik setelah krisis keuangan global. Asian Development Bank Institute menerbitkan sebuah laporan pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa kawasan ini membutuhkan USD 8 triliun untuk diinvestasikan dari tahun 2010 hingga 2020 dalam bentuk infrastruktur agar kawasan ini dapat melanjutkan pembangunan ekonomi. Dalam sebuah editorial di tahun 2014, surat kabar The Guardian menulis bahwa bank baru ini dapat memungkinkan modal Tiongkok untuk mendanai proyek-proyek ini dan memberikann peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi di kawasan ini, sesuai dengan pengaruh ekonomi dan politiknya yang terus meningkat.

Bank ini secara resmi didirikan pada Januari 2016, dengan Tiongkok sebagai pemegang saham terbesar. Pada tahun 2023, bank ini telah berkembang menjadi 109 anggota yang disetujui di seluruh dunia dan memiliki modal sebesar USD 100 miliar. Misi bank ini adalah membiayai Infrastruktur untuk Masa Depan-infrastruktur dengan keberlanjutan. Bank ini berkantor pusat di Beijing, Tiongkok, dan dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih oleh para pemegang saham AIIB untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jin Liqun adalah Presiden saat ini.

TUJUAN PENDIRIAN ASIAN INFRASTRUCTURE INVESMENT BANK

Di dalam Articles of Agreement (AOA) di tuliskan bahwa tujuan pendirian AIIB adalah untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Asia. AIIB bertujuan untuk memberikann dukungan keuangan dan teknis dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara anggotanya dan berkomitmen untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan melalui pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

AIIB mempunyai fokus khusus pada pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, inovatif, dan inklusif, serta berupaya untuk meningkatkan konektivitas wilayah Asia dan melibatkan sektor swasta dalam proyek investasi. Bank ini juga bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar lembaga keuangan internasional dan mempromosikan praktik tata kelola yang baik dalam proyek pembangunan.

Dengan demikian, tujuan pendirian AIIB adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mengurangi

kemiskinan, meningkatkan konektivitas wilayah Asia, dan mempromosikan kerja sama internasional serta praktik tata kelola yang baik dalam pembangunan ekonomi di wilayah Asia.

Ekonomi Indonesia Pada Masa COVID 19

Pandemi COVID 19 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tanggal 23 April 2020, Indonesia memiliki 5.136 kasus yang terkonfirmasi dan 469 kematian. Indonesia memiliki tingkat kematian terkait COVID 19 tertinggi di Asia Tenggara dan tidak siap untuk menghadapi pandemi ini. Indonesia hanya memiliki 3,7 dokter per 1.000 orang, dan infrastruktur medis tidak memadai. Dengan adanya dampak pandemi, pemerintah Indonesia memproyeksikan tahun 2020 akan mengalami pertumbuhan ekonomi terendah dalam 21 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,3%, turun dari perkiraan semula sebesar 5,2%.

Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahun 2020 sebesar 2,5%, dan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 0,5%. Dengan melihat ke belakang, proyeksi ini secara signifikan memperlihatkan perlambatan. Ekonomi Indonesia menyusut untuk pertama kalinya pada saat krisis keuangan Asia tahun 1998 dan mengalami kontraksi sebesar 2,07% pada tahun 2020. Sebelum pandemi, ekonomi telah berkinerja baik, sehingga dampak dari COVID 19 menjadi lebih besar. Pertumbuhan tercatat sebesar 5,02% pada tahun 2019 dan rata-rata 5,0% selama 6 tahun sebelumnya.

Krisis ini juga berdampak signifikan terhadap mata pencaharian, terutama pada masyarakat yang paling rentan. Indikator awal untuk Indonesia cukup mengkhawatirkan. Hampir 10 juta orang diperkirakan berisiko jatuh di bawah garis kemiskinan nasional, dengan tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat dari 9,4% pada Maret 2019 menjadi antara 11,9% dan 12,8% pada 2020. ADB memperkirakan penurunan lapangan kerja antara 1 juta hingga 7 juta, dan tingkat pengangguran diperkirakan meningkat dua kali lipat akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Penurunan upah tampaknya akan terjadi di sektor ekonomi formal, dan 53% tenaga kerja yang tidak tercakup dalam asuransi pengangguran sangat rentan. Kedatangan turis telah terhenti, membawa penurunan tajam dalam aktivitas jasa, terutama di Bali. Meskipun ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang besar, tetapi dengan upaya pemerintah dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan dapat pulih dari dampak pandemi ini dan mengalami pemulihan ekonomi yang stabil.

Peran Asian Infrastructure Investment Bank Dalam Menangani Pemulihan Perekonomian Indonesia

Kerja sama dan hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan AIIB selama kurang lebih 9 tahun telah banyak memberikann kontribusi dan bantuan yang baik bagi Indonesia dalam mendukung pembiayaan bagi proyek infrastruktur di Indonesia. Indonesia menjadi negara keempat penerima dukungan AIIB dengan nilai USD 3,13 miliar, diantaranya berupa dukungan untuk penanganan pandemi COVID 19 melalui Crisis Recovery Facility (CRF) COVID 19.

Pada tanggal 16 April 2020, AIIB mendirikan Crisis Recovery Facility (CRF) COVID 19. Melalui CRF, AIIB memberi dukungan para anggota dan kliennya termasuk Indonesia dalam mengurangi dan memitigasi tekanan ekonomi, keuangan, dan kesehatan masyarakat yang timbul akibat COVID 19. CRF tersedia untuk entitas sektor publik dan swasta di setiap anggota AIIB

yang menghadapi atau berisiko menghadapi dampak buruk yang serius akibat COVID 19. CRF dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap beragam kebutuhan perawatan kesehatan darurat dan kebutuhan ekonomi anggota AIIB. Pada awalnya, AIIB menyediakan CRF sebesar USD 13 miliar untuk membantu negara anggota dalam mengatasi COVID 19. Namun pada tahun 2022, dewan direktur AIIB menyetujui perluasan CRF hingga USD 20 miliar.

AIIB telah menyetujui pinjaman untuk Indonesia secara bertahap dengan total sebesar USD 1,5 miliar melalui program CRF untuk mendukung upaya penanggulangan COVID 19 dan membantu memitigasi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi dengan pembiayaan dua program, yaitu program COVID 19 Active Response and Expenditure Support (CARES) dan program Tanggap Darurat COVID 19. AIIB memberikann beberapa bentuk pinjaman dalam program CARES dan Tanggap Darurat COVID 19 di Indonesia, yaitu: (1) Pinjaman dengan pembiayaan bersama dengan World Bank dan ADB untuk program CARES dan Tanggap Darurat COVID 19. (2) Bantuan teknis dalam bentuk saran kebijakan untuk membantu Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID 19 dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat. (3) Pengawasan setelah program dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan baik dan memberikann manfaat yang diharapkan. (4) Saran kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program.

Pembiayaan Bersama Program CARES dan program Tanggap Darurat COVID 19

Dewan direksi AIIB telah menyetujui pinjaman pertama yang diajukan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Mei 2020, sebesar USD 750 juta dan dibiayai bersama dengan Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai cofinancier utama. Pinjaman ini merupakan pinjaman yang berbasis kebijakan dibawah countercyclical support facility COVID 19 pandemic response option (CPRO) ADB. Dana ini kemudiakan akan digunakan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat COVID 19 dengan memperluas program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pinjaman yang diberikan oleh AIIB ini merupakan bagian dari pembiayaan program CARES untuk menanggapi permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi COVID 19. Menurut Wakil Menteri Keuangan Indonesia, Bapak Suahasil Nazara, Pinjaman ini penting bagi Indonesia untuk mendukung layanan kesehatan dan melindungi pengeluaran sosial yang sangat dibutuhkan, dan memperluas program bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan untuk mengurangi dampak buruk sosial dan ekonomi dari COVID 19.

Pinjaman kedua pada bulan Juni 2020, AIIB menyetujui pinjaman tambahan sebesar USD 250 juta melalui program for results yang di-cofinance dengan World Bank untuk mendukung tanggap darurat COVID 19 di Indonesia dengan lebih memperkuat respons kesehatan jangka pendek, yang mencakup kesiapan pengujian, pengawasan, pencegahan dan pengobatan COVID 19, serta kesiapan rumah sakit. Sejalan dengan kebijakan CPRO ADB, program ini dirancang untuk memberikann dukungan anggaran umum guna mengisi kesenjangan dalam kebutuhan pembiayaan pembangunan pemerintah secara keseluruhan, sehingga memberikann posisi yang lebih baik bagi Indonesia untuk melaksanakan belanja pembangunan countercyclical melalui program PEN. Kebijakan countercyclical melalui program PEN pemerintah Indonesia mengalokasikan pendanaan untuk membantu meringankan beban pajak dan menciptakan permintaan melalui berbagai keringanan pajak dan program bantuan sosial. Program-program ini

membantu meningkatkan konsumsi. Karena dengan meningkatkan belanja konsumen akan mendorong aktivitas dan pertumbuhan ekonomi dan memulihkan perekonomian. Kebijakan countercyclical, dalam konteks ekonomi, mengacu pada tindakan pemerintahan atau lembaga keuangan untuk mengimbangi fluktuasi siklus ekonomi. Artinya, tujuannya adalah untuk merespons secara berlawanan terhadap perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi, khususnya dalam situasi ketika ekonomi menghadapi resesi atau pelambatan pertumbuhan.

Pinjaman ketiga AIIB menyetujui pinjaman tambahan sebesar USD 500 juta pada bulan juli 2021 yang digunakan untuk memperluas kegiatan program tanggap darurat COVID 19 di Indonesia. Selain dari AIIB, sumber dana program ini juga bersumber dari World Bank sebagai cofinancier utama yang diharapkan dapat mendukung program pengeluaran pemerintah Indonesia melalui pembiayaan paralel dan dirancang sesuai dengan kebijakan program for results dari World Bank. Berdasarkan program for results, dana akan disalurkan berdasarkan pencapaian hasil dengan menggunakan Disbursement Linked Indicators (DLI) dan Disbursement Linked Results (DLRs). Program ini mendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional Pemerintah Indonesia (RPJMN 2020-2024) yang memprioritaskan kesiapsiagaan pandemi dan keamanan kesehatan.

Berdasarkan program for results, program ini akan berfokus pada biaya rutin rumah sakit seperti gaji dan biaya tambahan untuk penyedia layanan kesehatan, terutama spesialis terkait COVID 19 (misalnya penyakit dalam, paru, dan spesialis perawatan kritis atau intensivis), pelatihan untuk sumber daya manusia, dan biaya tambahan lainnya. peralatan medis, APD dan alat tes yang mungkin diperlukan. Selain itu juga akan mendukung pengembangan dan penerapan langkah-langkah pengendalian infeksi dan keselamatan di lingkungan layanan kesehatan serta protokol pengobatan untuk menangani kasus di semua tahap. Selain itu, program ini juga akan mendorong pengembangan dan penerapan mekanisme penjaminan mutu laboratorium bagi mereka yang tergabung dalam jaringan. Hal ini mencakup penilaian kecukupan peralatan dan perlengkapan laboratorium. Di sini juga, protokol dan proses penjaminan mutu akan dikembangkan sendiri dan tidak bergantung pada layanan konsultasi dari luar. Selain itu, Program ini akan memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia dalam melakukan pelacakan kontak dan pengawasan dengan mendukung hotline pengawasan untuk pelaporan wabah dan penyakit baru pada manusia dan hewan berbasis masyarakat.

Penjabaran pinjaman dan bantuan teknis yang di implementasikan dalam program ini untuk mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi, dalam hal ini dengan memperkuat sistem kesiapsiagaan kesehatan nasional, program ini telah membantu Indonesia menjadi lebih tangguh dalam menghadapi krisis kesehatan di masa depan. Program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian, karena sistem kesehatan yang dipersiapkan dengan baik dapat secara efektif menjawab tantangan di masa depan dan meminimalkan dampaknya terhadap populasi dan perekonomian.

Bantuan Teknis

Bantuan teknis dapat berupa pengetahuan dalam berbagai bentuk seperti saran kebijakan, pelatihan dan pengembangan program dan kegiatan yang membantu dalam menghadapi pandemi yang diberikan kepada pemerintah atau organisasi dalam rangka

meningkatkan kinerja dan efektivitas program. Bantuan teknis yang mendukung pelaksanaan Program CARES adalah bantuan teknis pengetahuan dan dukungan tentang Saran Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi COVID 19. Bantuan teknis tersebut disetujui pada April 2020, dan ADB menjadi lembaga pelaksana bantuan teknis tersebut, dengan total pembiayaan sebesar USD 5 juta dalam bentuk hibah melalui dana khusus bantuan teknis ADB. Bantuan teknis ini mendukung penyusunan laporan pemantauan yang dipresentasikan kepada sub-komite dan komite kebijakan tingkat tinggi. Bantuan teknis ini dilaksanakan dari April 2020 hingga Desember 2021 dan diperpanjang hingga Desember 2022.

Selain itu, dalam program tanggap darurat COVID 19, World Bank dan AIIB telah bersama-sama merancang program untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons ancaman yang ditimbulkan oleh COVID 19 serta memperkuat sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat. Bantuan teknis yang mendukung pelaksanaan Program tanggap darurat COVID 19 adalah World Bank memiliki tim ahli dalam negeri yang berpengalaman di bidang kesehatan, operasi, dan fidusa yang memberikan dukungan implementasi secara rutin kepada kementerian kesehatan (Kemenkes) di Indonesia. AIIB juga memiliki tim yang akan berkolaborasi dengan tim World Bank dalam memberikan dukungan implementasi. AIIB dan World Bank berkolaborasi secara erat dalam mendukung pelaksanaan program dan proyek. Kedua tim bekerja sama untuk memastikan implementasi yang efektif dan berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Misi dukungan implementasi akan dilakukan oleh World Bank secara berkala dan akan melibatkan mitra terkait dengan berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia secara umum dan Kementerian Kesehatan secara khusus. Sumber daya yang memadai dialokasikan oleh AIIB untuk menyesuaikan dengan frekuensi misi dukungan implementasi World Bank. Tim World Bank berkolaborasi dengan beberapa penyedia layanan pembangunan lainnya termasuk USAID, DFAT, UNICEF, dan WHO, dalam memberikann bantuan teknis kepada pemerintah Indonesia untuk membantu mencapai area-area yang menjadi sasaran program for Results.

Pengawasan

Pengawasan dalam program CARES dan Program Tanggap Darurat COVID 19 ini bertujuan untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan program rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam program CARES, ADB bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia untuk menganalisis dan memantau dampak sosial-ekonomi pandemi COVID 19. Badan Kebijakan Fiskal adalah lembaga pelaksana Program CARES di Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan program yang efektif, ADB dan pemerintah membentuk kerangka kerja pelibatan negara, yang berfokus pada dialog kebijakan, pemantauan, dan pelaporan strategi dan langkah-langkah antisipatif pemerintah. Kerangka kerja ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan analisis yang diperlukan agar ADB dapat menyalurkan dukungan, termasuk melalui bantuan teknis. Kerangka kerja ini mencakup komite kebijakan tingkat tinggi yang diketuai bersama oleh Wakil Presiden ADB dan Wakil Menteri Keuangan Indonesia, yang didukung oleh komite teknis yang memberikann masukan seperti memantau langkah-langkah respons pemerintah secara keseluruhan.

Kerangka kerja dengan melibatkan negara yang dibentuk untuk Program CARES bertujuan untuk memastikan implementasi program yang efektif dan pemantauan terhadap

strategi dan langkah-langkah penanggulangan siklus ekonomi pemerintah di Indonesia. Kerangka kerja ini melibatkan komite kebijakan dan teknis tingkat tinggi, serta sub-komite yang memfasilitasi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kerangka kerja ini dirancang untuk mengidentifikasi kesenjangan dan analisis yang diperlukan agar ADB dapat menyalurkan bantuan, termasuk melalui bantuan teknis.

Selama implementasi, Komite PEN ditunjuk sebagai badan pelaksana, yang merampingkan pemantauan program karena Komite PEN juga memantau langkah-langkah penanggulangan pemerintah. Tiga sub-komite memfasilitasi keterlibatan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan entitas yang berfokus pada analisis data besar untuk mendorong solusi inovatif. Selain itu dalam program Tanggap Darurat COVID 19, World Bank menjadi cofinancier utama dan mengawasi program dan berfungsi sebagai titik fokus bagi AIIB terhadap peminjam. Tim World Bank akan memantau dan mendukung implementasi untuk menyetujui perjanjian pendanaan bersama antara World Bank dan AIIB dengan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi (M&E) untuk mengawasi program tanggap darurat di Indonesia. Sistem M&E ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program. Sistem M&E dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kemajuan dan dampak program, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memberikann umpan balik kepada para pemangku kepentingan program. Sistem M&E juga digunakan untuk memantau pelaksanaan program vaksinasi COVID 19, termasuk kepatuhan terhadap penentuan prioritas, pemberian vaksin secara gratis, serta kualitas vaksin dan pemberian layanan. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab atas aspek teknis dari peluncuran program, dan Pemerintah Indonesia telah melibatkan mitra pembangunan dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung dan memantau pelaksanaan penanggulangan COVID 19 dan peluncuran vaksin.

Saran Kebijakan

Sejak pertama kali program CARES diimplementasikan pada bulan (july-september) tahun 2020, beberapa saran yang diberikan untuk meningkatkan efektivitas program PEN dan kesehatan masyarakat COVID 19 pemerintah, yaitu: 1) Percepatan pengadaan produk kesehatan melalui terobosan administratif; 2) Perbaiki tata kelola data untuk membantu koordinasi program bantuan sosial melalui Satu Data Indonesia, 3) Memperluas cakupan program kesehatan masyarakat dan PEN untuk meningkatkan jangkauan terhadap kelompok rentan; 4) Meningkatkan ketangkasan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat; Dan 5) Meningkatkan pemantauan program melalui keterlibatan yang lebih luas dengan; 6) Kementerian dan lembaga pemerintah serta kolaborasi yang lebih mendalam dengan sektor swasta dan perusahaan big data. Saran-saran ini lebih fokus pada membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat.

Pada bulan (Oktober-Desember) tahun 2020, saran yang diberikan berfokus: 1) Memastikan komunikasi publik yang komprehensif untuk persepsi risiko yang tepat; 2) Mempercepat dan meningkatkan pengujian diagnostik COVID 19; 3) Merancang strategi vaksinasi yang berfokus pada ketersediaan dan distribusi; 4) Fokus pada bantuan tunai untuk bantuan sosial; 5) Meninjau kembali program bantuan bagi guru dan siswa; 6) Memulai reformasi

perlindungan sosial; 7) Pendampingan UMKM dan sektor informal; 8) Merevisi dan memperbarui indikator kinerja pemantauan dan evaluasi CARES; 9) Penguatan kapasitas negara dan khususnya pengurangan risiko bencana pada semua tahap jangka pendek (tanggapan darurat), jangka menengah (pemulihan dan rekonstruksi), dan jangka panjang (kesiapsiagaan); 10) Mendorong kebijakan yang lebih berbasis bukti untuk pemulihan ekonomi; 11) Memikirkan kembali cara memitigasi epidemi di masa depan dalam strategi pembangunan nasional; 12) Pembenahan database dan registrasi nasional untuk membangun database warga yang terintegrasi; 13) menggunakan data besar untuk memantau program dan memperkuat implementasi langkah-langkah; 14) Respons untuk menyediakan data yang andal dan terkini dalam situasi yang berubah-ubah; Dan 15) Mengawali pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber. Beberapa kritikus berpendapat bahwa respons pemerintah “lambat dan tidak praktis” karena buruknya penggunaan bukti dan informasi berbasis sains dalam pembuatan kebijakan baik dalam merespons pandemi maupun mendorong pemulihan ekonomi. Indonesia yang dinilai lamban dan tidak praktis karena kurangnya penggunaan bukti dan informasi berbasis ilmu pengetahuan dalam pembuatan kebijakan.

Pada bulan (januari-mei) tahun 2021, saran yang diberikan lebih berfokus: 1) Merancang strategi vaksinasi yang berfokus pada pengamanan pasokan dan percepatan laju vaksinasi; 2) Mengembangkan Program Perlindungan Sosial Adaptif pada masa dan pasca gelombang kedua COVID 19 dengan menggunakan DTKS terkini; 3) Memperkuat strategi komunikasi publik yang komprehensif untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat di masa pandemi; 4) Mendukung penelitian mengenai vaksin; 5) Memperkuat kapasitas pemerintah dalam melakukan tes, penelusuran, dan pengobatan (3T) serta memastikan penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik); 6) Meningkatkan tata kelola pencairan anggaran melalui, misalnya, penyederhanaan verifikasi klaim, pengaturan kredit, dan penyelesaian perencanaan program; 7) Melanjutkan insentif pemulihan usaha, bantuan tunai, dan hibah untuk mendukung operasional usaha UMKM; 8) Mereplikasi insentif yang terbukti berdampak seperti pada industri mobil dan perumahan; Dan 9) Mempersiapkan diri menghadapi krisis berikutnya (pasca-COVID 19) khususnya protokol manajemen krisis untuk perlindungan sosial, termasuk program dan opsi pembiayaan sebagai stabilisator otomatis. Saran-saran ini berfokus untuk meningkatkan tingkat pengujian, memperkuat kapasitas fasilitas kesehatan, dan mengupayakan data yang terintegrasi untuk layanan publik.

Pada bulan (juni-desember) tahun 2021, saran yang diberikan lebih fokus: 1) Pertahankan kebijakan yang fleksibel dan countercyclical pada tahun 2022; 2) Melaksanakan anggaran PEN tahun 2022 sebagai skema “soft-landing”; 3) Mempercepat vaksinasi, mengamankan pasokan, dan meningkatkan distribusi agar lebih efektif dan efisien; 4) Mempercepat produksi vaksin; 5) Ditransisi dari pandemi ke endemic; 6) Penggunaan digitalisasi dan adopsi teknologi perlu dipercepat. Pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan respons kebijakan terhadap pandemi COVID 19. Meskipun sempat dikritik sebagai “lamban dan tidak praktis” di awal pandemi, respons kebijakan pemerintah telah berkembang dan membaik.

KESIMPULAN

AiIB merupakan lembaga yang bergerak dalam pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikann kerja sama

secara teknis kepada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. AIIB merupakan lembaga, yang anggotanya adalah negara-negara dari berbagai negara yang berada di Asia. AIIB juga merupakan organisasi regional, yang aktivitas-aktivitasnya lebih terfokus pada daerah Asia yang bertujuan untuk membantu negara-negara anggota yang mengalami krisis ekonomi, banyaknya kemiskinan, dll. AIIB sendiri juga sudah banyak berperan bagi negara-negara anggotanya tidak terkecuali negara Indonesia.

Dengan demikian, AIIB berperan dalam perekonomian negara Indonesia pada masa pandemi COVID 19 dapat dilihat bagaimana AIIB memberikann pinjaman maupun dana hibah terhadap Indonesia yang selanjutnya dipergunakan oleh Indonesia dalam beberapa program-program yang terfokus pada kesehatan dan ekonomi. Program-program yang sudah dijalankan oleh Indonesia yang diperoleh dari dana dan bantuan teknis dari AIIB dan lembaga keuangan lainnya itu seperti, program COVID 19 Active Response and Expenditure Support (CARES) dan program tanggap darurat COVID 19 yang dibiayai di bawah program Crisis Recovery Facility yang dibentuk oleh AIIB untuk membantu anggotanya dalam mengurangi dan memitigasi tekanan ekonomi, keuangan, dan kesehatan masyarakat yang timbul akibat COVID 19. Program-program ini merupakan factor penting membantu Indonesia pulih dari dampak ekonomi pandemi COVID 19. Dengan memperbaiki sistem layanan kesehatan dan memberikann dukungan financial kepada rumah tangga yang rentan untuk membantu meningkatkan konsumsi masyarakat.

REFRENSI

A. Buku

Lenny Dermawan Sembiring et al., "Lembaga Keuangan Internasional", dalam Bank Dan Fintech: Eksistensi Bank Kini Dan Esok, ed. Wardhana Aditya hal 113, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Mas'ood, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan Metodologi). Jakarta: LP3ES, 1990.

Rakhmat, Muhammad Zulkiflar Rakhmat, M. Habib Pashya, and Gufron. "The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) In The Middle East." In Routledge Companion to China and the Middle East and North Africa, by Yahia H. Zoubir, 11. Routledge, 2023.

Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA, 2016.

B. Jurnal, Makalah, dan Laporan

Arianto, Bambang. "Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Perekonomian Dunia." Jurnal Ekonomi Perjuangan, 2020 : Vol.2 No.2 (Hal 106-126).

Asian Development Bank, Republic of Indonesia: COVID 19 Active Response and Expenditure Support Program, 2020.

Asian Development Bank, Republic of Indonesia: COVID 19 Active Response and Expenditure Support Program Third Monitoring Report for January-May 2021, 2021.

Asian Development Bank, Republic of Indonesia: COVID 19 Active Response and Expenditure Support Program Quarterly Monitoring Report (July-September 2020), 2020.

Asian Development Bank "Republic of Indonesia: COVID 19 Active Response and Expenditure Support Program Fourth Monitoring Report for June-December, 2021.

Callaghan, Mike; Hubbard, Paul, "The Asian Infrastructure Investment Bank: Multilateralism on the Silk Road", China Economic Journal, 2016, 9(2): 116-139.

Cindy Rezma Fanny, Dwi Nur Arifianti, Erlandi Daffa Augusta. "Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Sebagai Bentuk Hegemoni Baru Tiongkok." Journal of International Studies, 2019: Vol.2 No.1.

Iswardhana, Muhammad Ridha. "Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB): Wujud Dominasi Tiongkok di Dunia." DEFENDONESIA, 2022: Vol.6 No.1.

Kaloko, Azry Almi. "Implementasi Kerja sama Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Periode 2016-2018." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Loan Agreement, Republic of Indonesia and Asian Development Bank , COVID 19 Active Response and Expenditure Support Program
Loan Agreement, Republic of Indonesia and International Bank For Reconstruction And Development.

Mengqi Shao, May Tan-Mullins, Linjun Xie. "Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)'s Sustainable Safeguard Mechanism on Energi Projects." ELSEVIER, 2021.

Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulianda, Octavia Chotimah, Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." Jurnal Pendidikan, 2022: Vol.6 No.1 (Hal 974-980).

Sugihamretha, I Dewa Gde. "Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah COVID 19 Pada Sektor Pariwisata." The Indonesian Journal of Development Planning, 2020: Vol.IV No.2.

The World Bank, International Bank For Reconstructions and Development Program Paper On A Proposed Additional To The Republic Of Indonesia For An Indonesia Emergency Response To COVID 19 Program, 2021.

Tinni, ST Khadijah. "Kepentingan Indonesia Bergabung Dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)."

Xuehui Han, Jiaqi Su and Jang Ping Thia. "Impact of Infrastructure Investment on Development and Developing Economies." Asian Infrastructure Investment Bank, 2020.

Zulkipli, Muharir. "Dampak COVID 19 Terhadap Perekonomian Indonesia." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.

C. Artikel Daring

Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB Extends Additional Support to Indonesia for COVID 19 Vaccine Readiness and Emergency Response , 2021.

Asian Infrastructure Investment Bank. "Program Document of the Asian Infrastructure Investment Bank, Sovereign-backed Financing, The Republic of Indonesia EMERGENCY RESPONSE TO COVID 19 PROGRAM (Under the COVID-19 Recovery Facility)". 2020.

Asian Development Bank, Indonesia: COVID 19 Active Response and Expenditure Support Program, 2023.

Jeffrey W. Meiser, Introducing Liberalism in International Relations Theory, 2018.

Kemenkeu pedia, "Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 2021.

Rahayu Puspasari, Kementerian Keuangan "Sidang tahunan Ketujuh AIIB, Menteri Keuangan Serukan Pentingnya Kolaborasi Mendukung Program Transisi Energi", 2022.

Will Kenton, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB): History and Overview, 2023.

D. Web

Ahmad Nasrudin. "Peringkat Kredit AAA: Apa Maknanya Itu?". Cerdasco. April, 2022. <https://cerdasco.com>

Amanda Kusumawardhani, "Ini 10 Negara Yang Rugi Besar Akibat COVID 19", Ekonomi Bisnis.com, 2020. <https://ekonomi.bisnis.com>

Asian Infrastructure Investment Bank, About AIIB, <https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html>.

Asian Infrastructure Investment Bank, COVID 19 Crisis Recovery Facility, <https://www.aiib.org/en/policies-strategies/COVID-19-Crisis-Recovery-Facility/index.html>.

Asian Infrastructure Investment Bank, Governance Overview, <https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/index.html>

Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB Organization Structure, 2023. https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/_common/_download/AIIBOrganizational_structure.pdf

Bank, Asian Infrastructure Investment. About AIIB. <https://www.aiib.org/en/index.html> (accessed April 4, 2023).

Bank, Asian Infrastructure Investment. AIIB Expands COVID 19 Crisis Recovery Facility to USD 20 Billion. Maret 04, 2022. <https://www.aiib.org/en/news-events/news/2022/AIIB-Expands-COVID-19-Crisis-Recovery-Facility-to-USD20-Billion.html> (accessed April 03, 2023).

Emerging, Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi. COVID 19. Maret 27, 2023. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/COVID-19> (accessed Maret 2023).

Eurostat Statistics Explained." Glossary: Counter-cyclical fiscal measures", 2023. (accessed October 28, 2023)

Investments, Indonesia. Indonesia Pemegang Saham Terbesar ke-8 di Asian Infrastructure Investment Bank. Juli 01, 2015. <https://www.indonesia-investments.com/id/berita/kolom-berita/indonesia-pemegang-saham-terbesar-ke-8-di-asian-infrastructure-investment-bank/item5692> (accessed April 03, 2023).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kajian Dampak COVID 19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik, 2021, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-COVID-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-asia-dan-pasifik>

Malik, Abdul. IMF Ingatkan Banyak Negara Bisa Resesi di 2023, Begini Reaksi Harga Emas Hari Ini. Oktober 12, 2022. <https://www.bareksa.com/berita/emas/2022-10-12/imf-ingatkan-banyak-negara-bisa-resesi-di-2023-begini-reaksi-harga-emas-hari-ini> (accessed Maret 2023).

Masagung Suksmonohadi dan Diah Indira, Kebijakan Penanganan Pandemi COVID 19, 2020. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/8.Bab-5__Artikel_II-2020.pd Hal 90

Organization, World Health. Coronavirus disease (COVID 19) pandemic. [https://www.who.int/europe/emergencies/situations/COVID 19](https://www.who.int/europe/emergencies/situations/COVID-19) (accessed Maret 2023).

Organization, World Health. Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

Sulindo, Koran. Ekonomi Global 2023 Diprediksi Melemah. Januari 3, 2023. <https://koransulindo.com/ekonomi-global-2023-diprediksi-melemah/> (accessed Maret 2023).

Yantina Debora, AIIB, Penantang Baru World Bank dan IMF dari Cina, [tirto.id](https://tirto.id/aiib-penantang-baru-bank-dunia-dan-imf-dari-cina-cCcj), 2017, <https://tirto.id/aiib-penantang-baru-bank-dunia-dan-imf-dari-cina-cCcj>

World Trade Organization, Principles of the trading system, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm